

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Sebut Telah Memenuhi SPM

Zhong Thong Menjadi Armada Bus Transjakarta

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penggunaan bus Zhong Tong sebagai armada Transjakarta telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Bahkan perusahaan bus pabrikan China itu telah menjalin kontrak kerjasama dengan pengelolanya, Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) dalam melayani penumpang. "Pasti ada kontrak

kerja samanya dan di dalam kontrak itu ada aturannya juga," kata Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (17/10). Pernyataan Anies sekaligus menanggapi stigma di masyarakat tentang kualitas bus Zhong Tong.

Pada 2015 lalu, bus yang dioperasikan oleh Transjakarta, ini sempat terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada 8 Maret 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu mengaku kapok membeli bus Zhong Tong. Namun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, justru memakai bus ini dengan alasan kualitas bus sudah diperhatikan oleh pengelola.

Penggunaan bus ini merupakan bentuk pelaksanaan kontrak antara Zhong

Tong dengan PPD pada 2013. Adapun pelaksanaan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Pemprov DKI Jakarta itu sudah tidak lagi membeli bus, jadi Pemprov DKI Jakarta itu membeli jasa. Jasanya dibayar, kemudian Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM. Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola (PPD)," ujar Anies.

Menurut Anies, penggunaan transportasi umum terutama bus Transjakarta justru yang paling menonjol. Pada tahun 2017, jumlah penumpangnya mencapai 300.000 per hari. "Angka ini didapat setelah Transjakarta beroperasi selama 13 tahun. Bahan dalam dua tahun, berubah menjadi 640.000 penumpang per hari," ujar Anies.

Melihat naiknya jumlah penumpang ini, maka sistem pengelolaan armada ini diubah. Dulu bus Transjakarta dibeli DKI, kini dikerjasamakan oleh pihak ketiga. "Intinya DKI membeli jasa, dibayar per kilo meter, sehingga perawatan dan pengelolaan dilakukan pihak ketiga. Kami (DKI) tidak beli aset (armada) lagi," ungkapnya. **(faf)**